



Dinamika Sejarah Islam Kontemporer Di Timur Tengah Dan Afrika Utara (Data Abad 20 Dan 21)

Mizar Aulia^{1*}, Liza Wardani², Zaini Dahlan³

¹ Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{1*} mizar0332233056@uinsu.ac.id, ² liza0331233033@uinsu.ac.id, ³ zainidahlan@uinsu.ac.id

Info Artikel

Masuk:

25 Des 2023

Diterima:

30 Des 2023

Diterbitkan:

04 Jan 2024

Kata Kunci:

Dinamika,
Sejarah, Timur Tengah
Afrika Utara

Abstrak

Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara juga turut mengalami pendudukan penjajah yang mempengaruhi negara-negara yang ada dalam kawasan tersebut. Islam pasca kolonialisme seperti lahir kembali dan mencoba mencari pijakan-pijakan untuk berdiri dan membangun sebuah peradaban kembali. Namun, dalam proses tersebut tentu perkembangan Islam mengalami pergolakan dan dinamika-dinamika di berbagai sektor kehidupan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan beberapa dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara pada pasca kolonialisme sekitar abad ke-20 dan 21. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian kepustakaan atau library research. Sumber data pada penelitian ini merupakan buku-buku atau literatur-literatur terkait dengan substansi penelitian. Temuan yang dihasilkan yaitu terdapat beberapa dinamika yang terjadi diantaranya adalah dinamika keagamaan, dinamika politik dan ekonomi, dan dinamika intelektual dan kebudayaan. Abad 20 dan 21 menjadi awal baru peradaban Islam setelah mengalami masa penjajahan oleh kolonialisme barat. Penjajahan barat atas dunia Islam menimbulkan sebuah sistem struktural baru dengan lahirnya negara-bangsa yang merdeka. Meskipun mengalami pengelompokan akibat adanya negara-bangsa umat Islam tetap berusaha kembali. Dinamika-dinamika yang dihadapi umat Islam pascapenjajahan pada abad ke-20-21 merupakan sebuah tantangan baru yang harus dihadapi umat Islam demi mengembalikan kejayaan Islam.

PENDAHULUAN

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara lengkap proses sejarah Islam masa kontemporer yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada abad ke-20 sampai abad ke-21. Urgensi dan tujuan penulisannya makalah ini adalah untuk mengkaji perkembangan peradaban Islam pasca kolonialisme yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara sehingga menambah khazanah keilmuan sejarah Islam, mengingat betapa pentingnya mempelajari sejarah sebagai pelajaran dalam mempersiapkan kehidupan di masa depan. Mengkaji sejarah peradaban Islam juga bertujuan membawa seseorang agar memahami pertumbuhan peradaban Islam, mulai dari awal perkembangan sampai masa sekarang (Widodo, 2017: 1). Sebagai pusat peradaban Islam, Timur Tengah dan Afrika Utara memegang peranan penting dalam berkembangnya Islam dari awal lahirnya hingga sekarang. Membahas secara khusus sejarah Islam kontemporer wilayah tersebut tentunya memiliki kemestian, karena akan sangat berguna bagi perkembangan intelektual kesejarahan.

Dalam catatan sejarah Islam tumbuh dan berkembang pada mulanya terkonsentrasi pada wilayah Timur Tengah dan kemudian Afrika Utara sehingga menyebar luas ke seluruh belahan dunia. Timur Tengah sendiri terdiri dari beberapa negara bangsa yang berdaulat. Istilah "Timur Tengah" berawal dari julukan yang digunakan oleh bangsa kolonialisme barat untuk merujuk pada kawasan yang berdekatan dengan Turki atau timur dekat dan timur jauh yaitu India dan Cina. Memang ketika menyinggung soal Timur Tengah tidak dapat terlepas dari dua variabel penting lainnya, yaitu Arab dan Islam. Persentase masyarakat Arab dan masyarakat yang memeluk agama Islam menjadi mayoritas di kawasan ini sehingga kebanyakan orang menyebut bahwa warga yang tinggal di Timur Tengah adalah orang Arab.

Secara historis Timur Tengah pernah menjadi pusat peradaban dunia yang amat besar dan begitu luar biasa dengan berbagai macam kemajuan di dalamnya baik dalam bidang kedokteran, pendidikan, kesenian, astronomi, matematika hingga filsafat. Menilik pada abad ke-7 hingga 12 banyak kerajaan-kerajaan Islam menduduki sebagian wilayah yang membentang melalui Iran hingga ke Spanyol di Eropa, di saat yang sama kota Bagdad dan Cordova menjadi pusat peradaban dunia di mana banyak pemikir-pemikir dan ilmuwan Islam yang berhasil menemukan penemuan yang merubah dunia. Pada abad selanjutnya yakni abad ke-13 muncul sebuah gerakan intelektual yang luar biasa di Eropa Barat yang dengan gerakan tersebut bangsa barat mengasimilasikan temuan-temuan yang telah didapatkan oleh ilmuwan Islam (Asari

et al., 2020: 101). Sejak terjadinya asimilasi yang dilakukan bangsa barat terhadap berbagai temuan Islam, kemudian menjadikan dunia Islam secara perlahan semakin terpuruk ke dalam belenggu penjajahan yang dimulai sejak awal abad ke-16 (Asari, 2019: 20). Dalam periode ini Islam mengalami kemandekan di berbagai aspek kehidupan yang membuat peradaban Islam jatuh dalam keterpurukan. Kolonialisme menjadi faktor utama yang menyebabkan parahnya kemandekan yang diterima oleh Islam. Periode penjajahan kolonialisme tersebut berlangsung cukup lama hingga permulaan abad ke-20 dan sekadar beberapa negara saja yang bisa dikatakan merdeka menjadi sebuah negara.

Kemerdekaan yang diterima negara-negara Islam atas penjajahan kolonialisme Barat pada abad ke-20 tersebut bukan merupakan suatu hal yang eksklusif. Faktanya, hampir seluruh wilayah bagian belahan dunia menerima penjajahan baik di Asia, Amerika, Afrika dan Australia. Secara radikal penjajahan telah merubah seluruh struktur pengelolaan kehidupan bermasyarakat bangsa yang dijajahnya. Kebanyakan negara-negara setelah penjajahan menemukan sistem sosial-politik baru yang disebut dengan negara-bangsa (*nation-state*). Menyusul dengan terbentuknya negara-bangsa yang baru beragam garis perbatasan negara baru juga muncul. Dengan batas-batas tersebut umat Islam menjadi terkotak-kotakkan dan mengalami pengelompokan baru dalam batas-batas negara tersebut. Pada awalnya umat Islam bersatu dalam sebuah peradaban dan kehidupan sosial yang satu kini menjadi mandiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Namun proses tersebut dapat menjadikan umat Islam sebagai mayoritas dalam sebuah bangsa karena komposisi-komposisi tertentu. Proses yang sama dapat menjadikan umat Islam sebagai minoritas di negara tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk dikaji bagaimana sejarah Islam pada periode setelah penjajahan kolonialisme yakni pada abad ke-20 dan 21 atau lebih dikenal dengan periode kontemporer. Penulis merasa tertarik untuk membahas secara mendalam dengan berfokus pada bahasan “Sejarah Islam Kontemporer di Timur Tengah dan Afrika Utara (data abad ke-20-21)”. Dalam pembahasan nantinya penulis akan secara eksplisit menerangkan berbagai dinamika yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara termasuk di antaranya dinamika keagamaan, dinamika politik dan ekonomi, dinamika Intelektual dan Kebudayaan serta konflik di Timur Tengah seperti masalah Palestina, Perang Teluk dan ISIS tidak luput dari pembahasan yang akan coba diuraikan. Makalah Ilmiah ini bertujuan untuk menjabarkan secara umum dan sederhana mengenai sejarah Islam Kontemporer di Timur Tengah dan Afrika Utara sehingga dapat menjadi sumber materi dan bacaan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan metode kajian kepustakaan atau *Library research*. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengkaji, membaca ragam literatur yang relevan dengan substansi atau variabel penelitian selanjutnya merangkumnya ke dalam kerangka berpikir dengan landasan teoritis (Pringgar & Sujatmiko, 2020). Penulis mencoba mengkaji secara komprehensif fokus yang sedang diteliti dan memaparkannya secara jelas dan terperinci mengenai objek penelitian dengan mengacu pada bukti-bukti sejarah yang terdapat dalam literatur-literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Keagamaan

Dinamika keagamaan tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan peradaban Islam, keduanya berjalan beriringan dan menjadi satu kesatuan dalam membetuk sebuah kemajuan. Membahas dinamika keagamaan yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara juga bukan merupakan hal yang mudah, mengingat terdapat kompleksitas yang terjadi di dalamnya pada kedua wilayah tersebut. Pada bagian ini akan dikemukakan gambaran perkembangan dan dinamika keagamaan yang terjadi pada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara pada permulaan abad ke-20 hingga 21.

Saudi Arabia sebagai salah satu negara yang terdapat di wilayah Timur Tengah juga turut mengalami pergolakan dalam bidang agama di internal negara mereka. Saudi Arabia menjadi sebuah negara resmi pada awal abad ke-19 dan mempunyai histori panjang terhadap perkembangan Islam mulai dari zaman Rasulullah saw., sebelum menjadi sebuah negara-bangsa, Saudi Arabia mengalami proses panjang dalam sistem pemerintahan di wilayahnya. Dalam (Thohir, 2009: 16-17) menjelaskan bahwa awalnya wilayah-wilayah Arabia diduduki masing-masing oleh suku asli Arab. Pada kisaran tahun 1500, wilayah Saudi Arabia berhasil disatukan kembali oleh Kesultanan Turki Usmani sebagai Kesultanan yang berkuasa pada sebagian besar wilayah Islam. Islam adalah agama resmi yang diakui oleh negara Arab Saudi dan menjadi agama mayoritas penduduk disana, tetapi terdapat sebagian penduduk yang tercatat memeluk agama lain seperti Kristen dan Hindu (Asari, 2019: 41).

Sebagian besar masyarakat Arabia adalah Muslim sunni dan sebagian sisanya merupakan Muslim Syiah. Masyarakat yang menganut paham keagamaan syiah terafiliasi pada wilayah gurun daerah al-ahsa’ dan al-Qathif di timur Saudi Arabia ke arah teluk persia. Pemahaman keagamaan sunni yang dianut oleh hampir seluruh penduduk Saudi Arabia yang telah berkembang dan dilaksanakan disebut dengan Wahabiyah, merujuk pada sebuah nama yang pertama kali mempopulerkan atau sebagai peletak dasar pemahaman keagamaan Bani Sa’ud sejak awal yakni Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (w. 1787). Paham keagamaan Wahabi menafsirkan ajaran Islam secara kaku dan sederhana; pemahaman ini secara umum mempunyai kesamaan dengan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal atau Hambali dan pemikiran Ibn Taymiyah

(w. 1328). Wahabi mencoba mengembalikan ajaran Islam secara murni dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis saja. Sebagai contoh sederhana Saudi Arabia secara resmi hanya membenarkan dua perayaan hari besar Islam saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Negara ini tidak memperingati lahirnya Nabi Muhammad saw. Atau biasa disebut dengan maulid nabi. Praktik pelaksanaan tasawuf juga tidak dibenarkan secara publik. Berkaitan dengan makam: tidak diperkenankan membangun pemakaman yang dekoratif dan bermegah-megah, makam yang diperbolehkan hanya berupa nisan dari batu biasa seperti makam-makam di Baqi' yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi di Madinah yang tidak lebih dari sekadar sebuah tumpukan tanah dengan satu atau beberapa batu di ujungnya. Saudi Arabia juga mengatur pola kehidupan bergama agama lain dengan hanya mengizinkan menjalankan kegiatan keagamaannya secara tertutup.

Pemahaman wahabiyah semakin memantapkan posisinya di wilayah Saudi karena kedekatan al-Wahhab dengan pemimpin tertinggi kerajaan Saudi Arabia yaitu Muhammad ibn Saud. Persekutuan tersebut sebenarnya merupakan strategi Ibn Saud dalam memantapkan posisinya sebagai penguasa dihadapan suku-suku di Arabia. Dengan ideologi keagamaan wahabi yang dimiliki al-Wahhab, Ibnu Saud berusaha menyatukan suku-suku tersebut dengan harapan meraih cita-cita religius dalam mengabsahkan perjuangan jihadnya untuk menguasai wilayah dan kabilah Arabia, mentransformasi pemahaman akidah mereka menjadi Islam yang puritan (Esposito, 2003: 59).

Tujuan Wahabi menyebar keberbagai belahan dunia pada pertengahan abad ke-20 sekitar tahun 1960-an dalam merespon ancaman yang muncul dari sikap nasionalisme dan sosialisme Saudi Arabia (Esposito, 2003: 130). Dewasa ini tampaknya Saudi Arabia sangat berbeda dengan sebelumnya setelah visi mereka pada tahun 2030 dikembangkan. Perbedaan tersebut terlihat pada tatanan konstruksi kehidupan sosial masyarakat yang semakin bebas dalam berekspresi dan jauh dari kungkungan pemahaman keagamaan wahabiyah yang kaku. Faktor utama perubahan pesat kerajaan Saudi di latarbelakangi oleh terpilihnya putra mahkota Muhammad Bin Salman atau lebih dikenal dengan MBS menjadi perdana menteri kerajaan. Terobosan-terobosannya yang membuka Arabia terhadap modernisasi menjadikan Saudi Arabia kehilangan citranya sebagai negara yang konservatif dan tertutup terhadap kemodernan. Hal tersebut menjadikan posisi wahabi dalam kerajaan Saudi menjadi terancam, ulama wahabi meskipun memiliki posisi dalam kerajaan tidak memiliki kedudukan yang kuat dan tidak memiliki pendapat independen untuk didengarkan (Handerson, 1995: 16). Tidak dapat dinafikan bahwa eksistensi pemahaman wahabi dahulu dimanfaatkan oleh penguasa Saudi hanya untuk kepentingan politik, salah satu contohnya seperti mencegah pengaruh sosialisme sekuler yang dibawa oleh Nasser dan ekspor revolusi Iran yang dahulu dianggap sebagai ancaman besar terhadap *status quo* monarki tersebut. Dalam konteks masa kontemporer seperti sekarang, jelas kepentingan politik dan kondisi sosial sudah sangat berbeda dan tidak lagi relevan. Saudi Arabia memandang perlu untuk keluar dari doktrin dan dogma agama yang puritan menjadi Islam yang lebih moderat terhadap budaya dan perkembangan sosial dalam menyikapi perkembangan modernisasi. Kemudian pilihan berada pada ulama-ulama wahabiyah, apakah akan mendukung atau keluar dan melawan otoritas kerajaan Saudi Arabia.

Selain Saudi Arabia, dinamika keagamaan juga terjadi di Iran. Kebanyakan penduduk Iran berpaham keagamaan Syiah terutama yang beretnis persia atau sebagian dari orang-orang Arab. Pada masa modern, syiah seperti memiliki eksistensi dan perkembangannya di beberapa wilayah muslim. Meskipun beregrak secara masip dan tak jarang turut menunjukkan diri, membuktikan syiah masih bertahan hingga saat ini. Latar belakang berkembangnya pemahaman syiah ini didasarkan pada dua hal. *Pertama*, terdapat harapan dan kepercayaan bahwa akan kembalinya Imam kedua belas yang *ma'sum*, ini merujuk kepada Imam Muhammad Al-Mahdi yang nantinya akan memimpin umat Islam kepada kemenangan. *Kedua*, masih terjaganya rasa penghormatan yang begitu tinggi kepada sebelas Imam terdahulu. Niscaya, dengan tidak adanya imam tersebut telah membantu eksistensi ulama Iran di tengah masyarakat secara tidak langsung. Apalagi pasca revolusi yang terjadi pada tahun 1979 berdampak pada lahirnya demokrasi teokratis yang menjadikan peran ulama lebih sentral dari sebelumnya. Sebagai negara yang menjadi basis utama syiah, Iran terbilang aktif dalam menyumbangkan dukungannya terhadap kelompok muslim syiah di negara-negara lain misalnya seperti Irak, Suriah, Yaman dan Lebanon. Bentuk dukungan tersebut berupa bantuan logistik, persenjataan hingga persoalan ekonomi dan politik. Dengan langkah tersebut menjadikan Iran dijuluki sebagai pusat penyebaran doktrin pemahaman syiah keberbagai negara-negara di dunia. Pada konteks ini Iran acapkali dipersamakan dengan Saudi Arabia yaitu perannya dalam menyebarkan paham keagamaan di dunia.

Muhammad Husayn Thabathaba'i merupakan salah satu ulama Syiah kontemporer yang cukup dikenal sebagai penulis produktif, karyanya tidak hanya dikenal dan dipergunakan di kalangan pengikut syiah saja akan tetapi secara luas telah menyebar dipergunakan di dunia. Salah satu karyanya yang sangat monumental adalah *Tafsir al-Mizan* yang sudah tersebar secara luas ditingkat Internasional. Salah satu contoh lain yang merupakan penulis produktif adalah Murtadha Mutahhari yang karyanya sangat beragam dalam berbagai disiplin ilmu termasuk salah satunya tentang tafsir ajaran Islam dan hubungannya dengan konteks kontemporer. Karyanya bahkan sudah ada yang tersedia dalam terjemahan bahasa Indonesia, Hak-hak Wanita dalam Islam, Perspektif Al-Quran tentang Manusia dan Agama merupakan beberapa karya Mutahhari yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa karya-karya penulis Iran telah memberikan sumbangsih yang begitu besar terhadap perkembangan dan kemajuan khazanah keilmuan Islam kontemporer.

Bergeser dari Timur Tengah, dinamika keagamaan juga terjadi di Afrika Utara khususnya di Mesir. Sama halnya dengan Arab, penduduk Mesir juga mayoritas diisi dengan masyarakat yang beragama Islam dan sebagian kecil lainnya adalah Kristen Ortodoks Koptik. Salah satu sakte yang tertua sudah ada sejak abad ke-5. Di Mesir terdapat sebuah Universitas yang bernama Jami'ah Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar sekaligus menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi tertua di dunia. Universitas Al-Azhar telah ada sejak abad ke-10 dan dirikan oleh penguasa Dinasti Fathimiyah saat itu. Pada masa kontemporer modern, para syekh dan guru-guru besar dari lembaga pendidikan ini acap kali dimintai

pandangan dan fatwanya terkait berbagai macam permasalahan kontemporer dewasa ini terkait keagamaan Islam dan permasalahan dunia secara global. Otoritas dan kewibawaan keagamaan Al-Azhar sangat tinggi, hal ini disebabkan karena melalui lembaga ini dapat melahirkan alumni-alumni yang berpengaruh juga bermanfaat yang tersebar di seluruh dunia Islam. Al-Azhar juga aktif dalam mengirimkan guru-guru dalam bidang agama dan bahasa Arab ke berbagai negeri Islam untuk membantu proses pendidikan Islam. Walaupun semiat abad ke-16 an Al-Azhar mulai melakukan pembaharuan dalam pembelajarannya dengan mengintegrasikan berbagai macam cabang ilmu seperti sains dan teknologi, kewibawaan yang paling tinggi tetap berada pada bidang keilmuan agama Islam (Asari, 2019: 47).

Mesir sangat dikenal sebagai pusat awal pembaruan pemahaman keagamaan Islam dalam menghadapi era modernisasi dewasa ini. Melalui negeri ini banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaruan yang kemudian lewat pemikirannya berpengaruh besar dalam membentuk wacana dalam pergerakan pembaruan Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah Jamaluddin Al-Afghani (w.1897), beliau merupakan pemikir dan penggerak pembaruan yang sebenarnya lahir di Afghanistan tetapi banyak menghabiskan karis dan pengabdianya di Mesir. Selain itu, turut juga nama lain seperti Muhammad Abduh (w.1905) dengan salah satu karyanya yang begitu dikenal yakni Risalah Tauhid dan beberapa bentuk usaha-usaha pembaruannya yang juga diimplementasikan oleh Al-Azhar. Muhammad Abduh juga memiliki murid yang bernama Rasyid Ridha (w.1935) yang juga memiliki pengaruh besar bagi perkembangan Islam dan kalangan muslim modern lewat karyanya yang begitu besar berjudul Tafsir al-Manar (Asari, 2002: 87).

Berbicara tentang aspek dan dinamika keagamaan mesir maka tidak dapat dipisahkan oleh berdirinya Al-Ikhwan al-Muslimin, kelompok ini didirikan oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1928 (Purnomo, 2018:56). Sebenarnya kelompok ini adalah sebuah gerakan politik yang mempunyai visi untuk menegakkan kembali sebuah sistem pemerintahan yang mereka anggap sebagai sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah Islamiyah. Tampilan yang ditunjukkan oleh gerakan ini adalah sebagai sebuah kelompok yang bergelut pada bidang keagamaan seperti tarekat sufi yang kemudian pada pemilu tahun 1938 berusaha memasuki Parlemen namun gagal karena pada saat itu dimenangkan salah satu partai di Mesir yakni Partai Wafd. Akibat mengalami kekalahan pada pemilu, Al-Ikhwan al-Muslimun mengganti haluan menjadi gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Inggris dan anti akan Zionimes. Mereka membentuk kegiatan pelatihan untuk kader-kadernya dalam bersenjata, kegiatan ini dibungkus dengan cover kegiatan kepemudaan atau kependuan. Kegiatan tersebut juga menjadi latarbelakang dibuatnya organisasi khusus yang memiliki misi utama membasmi seluruh musuh Islam, namun kemudian ditunggangi oleh kepentingan politik untuk membunuh tokoh dan pejabat pemerintah yang mereka nilai sebagai musuh yang menghalangi Al-Ikhwan Al-Muslimun salah satunya Perdana Menteri Mahmud Fahmi An-Naqrasy (1888-1948).

Dinamika keagamaan yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada kenyataannya membawa beberapa pengaruh besar bagi peradaban Islam. Uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pergolakan-pergolakan masih terjadi dan dinamika yang menjadi beberapa permasalahan hendak dicarikan solusi yang tepat. Namun, dibalik dinamika yang ada, perkembangan-perkembangan yang dicapai dalam bidang keagamaan tentunya harus senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan demi menjaga kestabilan kemajuan peradaban Islam dalam keagamaan.

2. Dinamika Politik dan Ekonomi

Kerajaan Arab Saudi modern telah diperintah oleh tujuh raja sejak tahun 1932. Raja yang berkuasa saat ini adalah Salman ibn Abd al-Aziz al-Saud, menggantikan Raja Abdullah yang meninggal pada Januari 2015. Raja Saruman diangkat menjadi raja pada usia 79 tahun. Oleh karena itu, pada tahun ia segera mengangkat seorang putra mahkota, yang kemudian menggantikannya. Jabatan tersebut awalnya diberikan kepada sepupunya Muhammad ibn Nayef, namun diteruskan kepada putranya Muhammad ibn Salman pada Maret 2015. Sebagaimana lazimnya dalam pemerintahan, pergantian pemerintahan selalu disertai dengan intrik internal dan terkadang konflik antar calon penguasa lainnya. Selama ini penguasa Arab Saudi masih merupakan anak dari 'Abd al-Aziz ibn Saud yang meninggal pada tahun 1953. Muhammad ibn Salman adalah putra mahkota pertama yang lahir dari generasi cucunya yang mendirikan Arab Saudi modern.

Kebijakan Arab Saudi sangat bergantung pada statusnya sebagai pelindung Tanah Suci Islam. Di satu sisi, posisi seperti itu menjadikannya "istimewa" secara religius; Di sisi lain, hal ini membuat seluruh negara Islam tanpa terkecuali menginginkan hubungan baik dengan Arab Saudi. Stabilitas politiknya juga sangat bergantung pada kemampuan keluarga Sa'ūd mengendalikan suku-suku Arab yang sudah banyak jumlahnya. Arab Saudi memelihara hubungan yang sangat erat dengan dunia Barat, khususnya dengan Inggris dan Amerika Serikat. Kedekatan ini terutama didorong oleh modernisasi teknologi militer, perekonomian (khususnya eksplorasi minyak dan gas), dan keamanan regional.

Pemerintahan daerah Mesir terdiri dari kegubernuran (muhâfazhah), distrik (markaz) dan subdistrik (qaryah). Di setiap tingkat terdapat dewan terpilih dan administrator pemerintah yang ditunjuk. Hingga tahun 1960an, pemerintah pusat Mesir masih dominan dan pemerintah daerah hanya mempunyai sedikit kebebasan. Namun, situasi di belakangan ini mulai berubah. Mesir dibagi menjadi 27 provinsi; lima diantaranya merupakan kota berstatus provinsi yaitu Kairo, Al-Iskandariyah, Port Said, Suez dan Luxor (al-Aqshar). Ikhwân al-Muslimîn yang disebutkan di atas merupakan elemen penting dalam perjalanan sejarah politik Mesir kontemporer. Sebab, dalam perjalanannya, organisasi yang awalnya fokus pada reformasi bidang keagamaan, kemudian terjun ke politik praktis. Misalnya, kelompok tersebut dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan Presiden Gamal Abdel Nasser pada tahun 1964; yang kemudian berujung pada penindasan pemerintah terhadap Ikhwân al-Muslimîn. Ideolog kelompok tersebut, Sayyid Qutb, menulis beberapa buku terkenal, antara lain Ma'âlim fi al-Tharîq dan Jâhiliyyat al-Qarn al-'Isyrîn. Setelah beberapa waktu dipenjara, Qutb akhirnya dieksekusi pada tahun 1966.

Setelah melakukan aktivitas bawah tanah, Ikhwanul Muslimin bangkit kembali pada tahun 1980. Kali ini, tujuan utama Ikhwân al-Muslimîn adalah reformasi sosiopolitik; secara spesifik, ingin mendirikan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam. Gerakan ini semakin kuat sepanjang tahun 1990an, baik di Mesir maupun di berbagai negara. Ikhwân al-Muslimîn aktif berpartisipasi dalam protes yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011. Partai yang mereka dirikan, Partai Kebebasan dan Keadilan (Hurriyyah wa al-'Adâlah), memenangkan pemilihan umum tahun dan berhasil mendirikan Muhammad Mursi sebagai presiden. Kepemimpinan Morsi tidak bertahan lama karena ia mendapat tentangan dari militer, kelompok sekuler, bahkan kelompok Kristen. Pada bulan Juli 2013, ia digulingkan oleh tentara dan kemudian digantikan oleh Jenderal Abd al-Fattâh al-Sîsi. Ikhwân al-Muslimîn kemudian kembali dianiaya dan bahkan dinyatakan sebagai organisasi teroris. Pemimpinnya dan banyak anggotanya ditangkap dan beberapa orang tewas dalam prosesnya.

3. Dinamika Intelektual dan Kebudayaan

Setelah melakukan aktivitas bawah tanah, Ikhwanul Muslimin bangkit kembali pada tahun 1980. Kali ini, tujuan utama Ikhwân al-Muslimîn adalah reformasi sosiopolitik; secara spesifik, ingin mendirikan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam. Gerakan ini semakin kuat sepanjang tahun 1990an, baik di Mesir maupun di berbagai negara. Ikhwân al-Muslimîn aktif berpartisipasi dalam protes yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011. Partai yang mereka dirikan, Partai Kebebasan dan Keadilan (Hurriyyah wa al-'Adâlah), memenangkan pemilihan umum tahun dan berhasil mendirikan Muhammad Mursi sebagai presiden. Kepemimpinan Morsi tidak bertahan lama karena ia mendapat tentangan dari militer, kelompok sekuler, bahkan kelompok Kristen. Pada bulan Juli 2013, ia digulingkan oleh tentara dan kemudian digantikan oleh Jenderal Abd al-Fattâh al-Sîsi. Ikhwân al-Muslimîn kemudian kembali dianiaya dan bahkan dinyatakan sebagai organisasi teroris. Pemimpinnya dan banyak anggotanya ditangkap dan beberapa orang tewas dalam prosesnya.

Setelah tahun 1967, banyak pemikir Arab terpaksa mempertimbangkan kembali banyak persoalan penting yang sebelumnya dianggap sepele, seperti penyucian kitab suci (Abu-Rabi', 2004: 59). Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para intelektual Arab kontemporer, beberapa di antaranya masih bersifat tematis dengan gagasan-gagasan yang muncul pada masa Kebangkitan Arab pertama pada tahun 2000. Setiap intelektual mempunyai kecenderungan dan fokus tersendiri dalam memikirkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, beberapa topik dapat dibahas lebih detail dibandingkan topik lainnya. Misalnya saja kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab pada umumnya. Ini lebih besar dari sistem pendidikan di dunia Arab. Status Islam dalam masyarakat Arab mendapat perhatian lebih dibandingkan masalah kemanusiaan atau hak asasi individu. Permasalahan politik, terutama yang berkaitan dengan politik luar negeri, seringkali berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ide-ide sosialisme dan nasionalisme di dunia Arab telah menarik lebih banyak penelitian dibandingkan ide-ide kebebasan dan demokrasi. Imperialisme Barat dan Zionisme sebagai penghambat kemajuan Arab dianalisis lebih rinci daripada pertanyaan tentang sistem kelas (Boullata, 2002: 7).

Di antara tema-tema di atas, kedudukan Islam dalam bidang kehidupan sosial-politik tetap menjadi isu intelektual terpenting bagi kedua generasi (Kebangkitan Arab Pertama dan Kebangkitan Arab Kedua). Tentu saja, hal ini berbeda bagi mereka yang berpandangan Marxis liberal dan mereka yang berpandangan Islamis atau fundamentalis, namun perlu diingat bahwa tempat dan peran Islam dalam konteks sosio-politik tetap ada. Hal ini penting untuk dilakukan. Ini adalah topik besar. Melihat sistem istem Pendidikan di Arab Saudi mengikuti pola umum. sekolah dasar, sekolah menengah pertama (3 tahun), sekolah menengah (3 tahun) dan universitas (4-6 tahun sarjana, 2 tahun magister, dan 3 tahun doktor). Tempat-tempat terkenal antara lain Universitas Madinah, Universitas King Abd Aziz, dan Universitas King Saud. Arab Saudi juga memberikan dana bagi generasi muda untuk belajar teknik di luar negeri, terutama di negara maju. Seperti disebutkan di atas, Al-Azhar merupakan situs keagamaan yang sangat penting di Mesir dan memiliki jaringan pengaruh di seluruh dunia Islam. Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan tersebut menjadikan Mesir sebagai tujuan banyak pencari ilmu pengetahuan dari seluruh dunia, sehingga turut menambah kekayaan kehidupansosial dan budaya Mesir.

Melalui jaringan Al-Azhar, Mesir juga mempunyai pengaruh agama dan budaya yang sangat luas. Banyak pemimpin sosial-keagamaan dan bahkan politik di dunia Islam adalah lulusan universitas tertua di dunia. (Asari, 2019: 51). Dengan akar sejarah yang sangat kuat di bidang pendidikan dan kebudayaan, Mesir dikenal tidak hanya sebagai rumah para ulama terkemuka, tetapi juga sebagai rumah para penulis di bidang sastra. Beberapa penulis Mesir terkenal secara internasional karena karya-karyanya. Pakar terkemuka di bidang ini antara lain Mohammad Hussein Heikal, Nawal El Saadawi, dan Najib Mahfuzi. Nama keluarga ini memenangkan Hadiah Nobel Sastra pada tahun 1988. Kehormatan ini ia peroleh berkat karyanya Bayn alQashrayn (Antara Dua Istana), Qashr al-Syawq (Istana Keinginan), dan Al-Sukkaryyah (Toko Gula). Ini dikenal sebagai Trilogi Kairo dan berlangsung dari tahun 1956 hingga 1957. Iran memiliki akar yang sangat kuat di bidang sastra.

Masa kejayaan Islam meninggalkan banyak tokoh besar seperti Abu al-Qasim al-Firdawsî dan Farid al-Din al-Attar. Tradisi sastra Iran berkembang pesat, namun setelah tahun 1979 berkembang ke arah yang berbeda. Para penulis liberal kurang mempunyai kebebasan, dan beberapa bahkan meninggalkan Iran. Banyak karya sastra Persia selanjutnya ditulis dan diterbitkan di luar Iran. Namun, tingkat melek huruf masyarakat Iran relatif tinggi dibandingkan kawasan Timur Tengah. Kedekatannya dengan Eropa mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra Turki. Negara ini telah mengembangkan sistem pendidikan yang pada dasarnya didasarkan pada model Eropa. Beberapa universitas di Turki menempati posisi penting di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat bahasa Turki juga relatif tinggi, sebagian besar ditulis dalam bahasa nasional dan internasional. Penulis Turki Orhan Pamuk memenangkan Hadiah Nobel Sastra pada tahun 2006. Penulis kelahiran Istanbul ini telah banyak menulis karya sastra, antara lain "Kar" (Kota Kars), "Kara Kidap" (Buku Hitam), dan "Istanbul: Hatıralar ve Sehir" (Istanbul:). memori dan kota). Karya Pamuk telah

diterjemahkan ke puluhan bahasa asing Barat dan Timur. Karya sastra Pamuk tampaknya mencerminkan perjuangan yang sedang berlangsung antara tradisi lokal Turki-Islam dan tradisi Barat yang secara sadar didirikan di negara tersebut.

Setelah melakukan aktivitas bawah tanah, Ikhwanul Muslimin bangkit kembali pada tahun 1980. Kali ini, tujuan utama Ikhwan al-Muslimin adalah reformasi sosiopolitik; secara spesifik, ingin mendirikan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam. Gerakan ini semakin kuat sepanjang tahun 1990an, baik di Mesir maupun di berbagai negara. Ikhwan al-Muslimin aktif berpartisipasi dalam protes yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011. Partai yang mereka dirikan, Partai Kebebasan dan Keadilan (Hurriyyah wa al-'Adalah), memenangkan pemilihan umum tahun dan berhasil mendirikan Muhammad Mursi sebagai presiden. Kepemimpinan Morsi tidak bertahan lama karena ia mendapat tentangan dari militer, kelompok sekuler, bahkan kelompok Kristen. Pada bulan Juli 2013, ia digulingkan oleh tentara dan kemudian digantikan oleh Jenderal Abd al-Fattâh al-Sîsî. Ikhwan al-Muslimin kemudian kembali dianiaya dan bahkan dinyatakan sebagai organisasi teroris. Pemimpinnya dan banyak anggotanya ditangkap dan beberapa orang tewas dalam prosesnya.

4. Konflik Timur Tengah

Membahas Timur Tengah mengingatkan akan konflik yang masih terjadi hingga dewasa ini di kawasan tersebut. Mulai dari perang saudara, perebutan lahan dan kekayaan alam, hingga pembantaian tanpa sebab dan alasan yang bisa dibenarkan. Pada bagian ini penulis akan mencoba menguraikan beberapa konflik yang belakangan terjadi seperti Palestina, perang Teluk dan ISIS. Dengan gambaran kasar yang coba penulis sajikan harapannya dapat membuka pengetahuan terkait konflik-konflik yang terjadi tersebut.

a. Palestina: Menanti Akhir Kolonialisme

Wilayah ini dan Timur Tengah secara umum telah berada di bawah kekuasaan Turki Utsmaniyah setidaknya selama tiga abad, sehingga kita harus mengakui bahwa Kesultanan Utsmaniyah telah lama menguasai tanah Palestina. Palestina pertama kali diserahkan kepada imperialisme Inggris oleh Turki Ottoman pada tahun 1917 akibat kekalahan Inggris dalam perang tersebut. Pasca deklarasi kemerdekaan Israel pada 15 Mei 1948, Palestina seakan-akan baru saja bertransisi dari negara Arab-Islam menjadi negara Yahudi. Dari tahun 1948 hingga 1968, Israel merupakan kekuatan yang signifikan dan kuat di Palestina dan seluruh wilayah timur. Umumnya biasa-biasa saja. Buktinya, pada perang tahun 1967, beberapa negara Islam seperti Mesir, Yordania, Suriah, Bayrut, Arab Saudi, Irak, dan Palestina bahkan pernah berkonflik dengan Israel, padahal kenyataannya bagaimana hubungan umat Islam dengan negara masing-masing. negara? Saya juga tidak bisa melakukannya. Israel didirikan sebagai negara merdeka secara hukum setelah mencaplok beberapa negara Islam yang disebutkan di atas.

Jauh sebelum berdirinya negara Israel di Timur Tengah, kaum Yahudi selalu mempunyai keinginan kuat untuk menduduki tanah Palestina. Berbagai inisiatif direncanakan, termasuk Perjanjian Balfour Inggris, upaya pembelian tanah Palestina, dan provokasi lainnya. Terlebih lagi, umat Islam dari berbagai kalangan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang harus diterapkan di Palestina. Mereka malah mengidealkan dan menuntut pencabutan Janji Balfour yang sarat dengan ketidakadilan dan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Pertanyaannya adalah: Bagaimana Israel bisa eksis sebagai negara merdeka di wilayah sah Turki Ottoman? Saya tidak bisa melakukannya. Sepanjang sejarah hingga saat ini, orang-orang Yahudi telah melakukan segala upaya untuk mewujudkan rencana dan tujuan mereka demi kekayaan dan politik. 19 Di Inggris, Eropa, dan lebih khusus lagi pada tahun 1897, Judenstadt, atau yang kemudian biasa disebut Negara Israel, didirikan. Organisasi ini menganjurkan ideologi yang mirip dengan arti Zionisme (Zion berarti Batu atau mengacu pada Haykal Sulaiman dari al-Quds), yang memungkinkannya menjadi pusat negara Yahudi. Meskipun pendudukan Yahudi di Palestina berakhir dengan berdirinya negara Israel yang merdeka, namun sebenarnya dimulai dengan berdirinya Organisasi Zionis Dunia pada tahun 1897 M. Tujuan utama organisasi ini adalah didirikannya negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Rencana strategis Zionis ini dikembangkan oleh seorang pelobi Zionis yang berpengaruh (kepala negosiator Zionis), Dr. De Pelobi. Weizmann mendapat dukungan dari Inggris dan Zionis Inggris. Di bawah kepemimpinannya, Zionis berusaha mencapai tujuan utama mereka: pendirian negara Yahudi di Palestina pada tahun. Menurut Mohd, hal ini untuk mencapai tujuan utama. Roslan Mohd. diprogram Pertama, mendorong, jika perlu, kolonisasi Palestina melalui sistem kerja pertanian dan industri Yahudi. Kedua, menciptakan organisasi dan kerja sama dengan militer Yahudi secara keseluruhan melalui kendali organisasi lokal atau internasional berdasarkan hukum nasional. Ketiga, memperkuat dan meningkatkan kesadaran dan sentimen nasional Yahudi. Keempat, bersiaplah untuk meminta persetujuan pemerintah jika diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan rencana Zionis. (Nor, 2010: 75).

Keempat rencana inilah yang menjadi landasan perjuangan Yahudi di Palestina. Dengan keempat program tersebut, mereka mendapat simpati dan simpati dari kaum Yahudi pada umumnya di seluruh dunia, dan juga dukungan dari Britania Raya atau Britania Raya pada khususnya. Terakhir, ia menyebutkan dukungan Inggris, seperti terlihat dalam Deklarasi Balfour tanggal 2 November 1917. (Nor, 2010: 76). Perjanjian Inggris dalam bentuk Deklarasi tersebut merupakan kontribusi penting bagi pendirian negara merdeka bangsa Yahudi di tanah Palestina, dan bangsa Yahudi menggunakan Deklarasi Balfour untuk mempengaruhi negara-negara lain di seluruh dunia, khususnya di Eropa Timur. untuk melanjutkan upaya mereka. Mendukung orang-orang Yahudi akan memungkinkan Palestina untuk memiliki negara merdeka, yang kemudian dikenal sebagai Negara Israel.

Dalam sejarah Palestina modern yang sebenarnya umumnya Arab-Muslim, Palestina didirikan pada tahun 1917 oleh Inggris. Ini terjadi sekitar waktu yang sama ketika Turki Ottoman dan Liga Bangsa-Bangsa dikalahkan di Palestina sebelum izin PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa diberikan. Persatuan negara-negara. Setelah penunjukan saya di Inggris, sayalah yang bertanggungjawab untuk memerintah Palestina. Komunitas Muslim dengan ulama seperti Haji Husayni (Mufti Palestina) dipengaruhi oleh kolonialisme Inggris dan negara Judenstadt di Eropa, atau kemudian negara Israel yang semakin populer Badan Zionis. Fakta ini menyebabkan orang-orang Yahudi keluar masuk Palestina pada saat orang-orang Yahudi sangat tertindas dan tertindas di seluruh Eropa, khususnya di Eropa Timur. Inilah awal mula malapetaka dan penyebab konflik antara Muslim dan Yahudi di Palestina. Selain itu, Negara Israel menjadi bagian penting dari rencana pembangunan .

Perjanjian Inggris dalam bentuk Deklarasi tersebut merupakan kontribusi penting bagi pembentukan negara Yahudi yang merdeka di Palestina, dan orang-orang Yahudi menggunakan Deklarasi Balfour untuk mempengaruhi seluruh dunia, khususnya negara-negara Eropa Timur, untuk melanjutkan upaya mereka. Dengan dukungan Yahudi, Palestina menjadi negara merdeka yang kemudian dikenal sebagai Negara Israel. Sebenarnya sejarah Palestina modern yang umumnya Arab-Muslim adalah Palestina didirikan pada tahun 1917 oleh Inggris. Hal ini terjadi sekitar waktu yang sama ketika Turki Ottoman dan Liga Bangsa-Bangsa dikalahkan di Palestina sebelum PBB atau PBB memberikan izin. Persatuan negara-negara. Setelah penunjukan saya di Inggris, saya menjadi kepala Otoritas Palestina. Komunitas Muslim, dengan ulama seperti Haji Hussaini (Mufti Palestina), dipengaruhi oleh kolonialisme Inggris dan negara-kota Yahudi Eropa atau, kemudian, negara Israel yang semakin populer Badan Zionis. Fakta ini menyebabkan masuk dan keluarnya orang-orang Yahudi dari Palestina pada saat orang-orang Yahudi sangat tertindas dan tertindas di seluruh Eropa, khususnya di Eropa Timur. Inilah awal mula malapetaka dan penyebab konflik antara Muslim dan Yahudi di Palestina. (Nor, 2010: 78).

Kenyataan yang lebih buruk lagi bagi umat Islam Palestina adalah setelah kemenangan Israel dalam Perang Enam Hari pada bulan Juni 1967, Yerusalem Timur diduduki dan Masjid Al-Aqsa serta Bayt Al-Maqdis berada di bawah kendali politik dan hukum. Israel melanjutkan serangan brutal dan pembunuhannya terhadap Muslim Palestina. Pada 21 Agustus 1969, Masjid Al-Aqsa dibakar dan rusak sebagian, termasuk mimbarinya yang berusia 1000 tahun. Pada tahun 1980-an, Muslim Palestina membebaskan diri dari kekuasaan Israel dan bersatu untuk membela diri. Gerakan mereka dikenal sebagai Intifada Pertama dan berlangsung hingga tahun 1993.

Gerakan pembebasan umat Islam ini mereda setelah Perjanjian Oslo menyerukan perdamaian dan mengizinkan warga Israel untuk hidup bebas di Palestina. Namun, meskipun ada Perjanjian Oslo, Israel terus menindas Muslim Palestina. Sejak akhir tahun 2008 hingga 22 Januari 2009, serangan mereka sangat brutal, menjatuhkan bom dan menghancurkan sekolah, tempat ibadah, gedung-gedung publik, dan bahkan rumah. Mereka menyerang dengan dalih berperang dengan Hamas, yang menguasai Gaza sejak Maret 2006. Israel memandang Hamas sebagai kelompok teroris yang harus dilawan dan mendesak negara-negara Barat untuk tidak memberikan dukungan finansial kepada Hamas. Faktanya, Palestina sedang dan akan terus diperlakukan dengan semakin buruk oleh orang-orang Yahudi Israel, negara-negara Muslim lainnya berada dalam posisi yang lemah, dan semakin sedikit menerima perhatian dan dukungan dari negara-negara Islam. Misalnya perpecahan antar bangsa dan perpecahan di dalam negara-negara Islam sendiri, seperti Mesir, Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, kaum Yahudi Israel semakin kuat secara ekonomi dan persenjataan, serta terus menerima dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Imigrasi Yahudi ke Israel juga meningkat pesat di seluruh dunia. Ketika Israel didirikan pada tahun 1948, populasi Yahudi meningkat menjadi 650.000, namun pada tahun 2000 jumlahnya meningkat menjadi 4.947.000.

b. Perang Teluk

Perang Iran-Irak, juga dikenal sebagai Perang Teluk Pertama, adalah perang panjang yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988. Pemicunya adalah pencabutan Perjanjian Aljazair secara sepihak oleh Saddam Hussein pada tahun 1975. Perjanjian tersebut ditandatangani antara Shah Reza Pahlavi dan Saddam Hussein atas nama Saddam Hussein, yang mendirikan Shatt al-Arab antara Iran dan Irak pada tahun 2000. telepon. Saddam Hussein merasa harus menerima perjanjian ini karena Shah Reza Pahlavi memiliki kekuatan militer yang besar saat itu. Sebelum memasuki wilayah Iran, Saddam aktif mengunjungi negara-negara Teluk. Utusan Saddam mengunjungi semua negara Teluk Arab dalam upaya mencapai kesepakatan mengenai front bersama Arab melawan revolusi Iran. Pada bulan Agustus 1980, Saddam Hussein mengunjungi Arab Saudi dan Kuwait. Tujuan dari kegiatan diplomatik ini adalah untuk membentuk "Arab Entente," atau dukungan gabungan Arab, untuk mendukung operasi militer Irak melawan Iran. (Rais, 1987: 209). Dalam perang ini, Irak didukung oleh sebagian besar negara Arab, antara lain Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Mesir, dan Amerika Serikat, sedangkan Iran didukung oleh Libya dan Suriah.

Meskipun Revolusi Islam pecah di Iran, hubungan baik antara Iran dan Irak tetap tidak tergoyahkan. Pemimpin Irak Presiden Bakr mengirimkan pesan pribadi kepada Ayatollah Khomeini, menyampaikan ucapan selamat dan segala harapan terbaiknya kepada Republik Islam Iran. Oleh karena itu, Mehdi Bazargan mengunjungi Irak untuk memperkuat hubungan bilateral (Hasyim, 2009: 684). Namun, dengan mundurnya Presiden Bakr dan bangkitnya Saddam Hussein, hubungan antara Iran dan Irak memburuk. Saddam Hussein mengusir ribuan warga Iran dari Irak setelah kelompok Syiah Irak al-Dawla dicurigai melakukan upaya pembunuhan terhadap Menteri Luar Negeri Tariq Aziz.

Saddam Hussein memerintahkan eksekusi ulama Syiah Said Muhammad Baqir sebagai Sadr. Perang Iran-Irak dinilai rumit dan rumit. Penyebabnya antara lain konflik masa lalu antara Kesultanan Utsmaniyah dan Persia, perselisihan antara Sunis dan Syiah, perbedaan etnis antara Arab dan Persia, perselisihan perbatasan dan politik, atau perselisihan kaya

minyak. Ini termasuk upaya Iran untuk mengambil alih wilayah tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh ambisi Saddam Hussein. Schulze), 234). Dalam bukunya *The Longest War*, Dilip Hiro menjelaskan akar permasalahan antara Iran dan Irak. Konflik antara Irak dan Iran sudah ada sejak zaman Turki Ottoman (1517-1918) dan Safawi Persia (1517-1722). Irak adalah wilayah/provinsi paling timur dari Kesultanan Utsmaniyah dan Iran adalah pusat Kesultanan Safawi. Konflik antar kerajaan terutama berkisar pada masalah perbatasan dan campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing kerajaan.

Safawi menginginkan akses ke tempat-tempat suci Syiah di Irak, termasuk Karbala, Kufah, Samara, dan Najaf. Kedua belah pihak saling mencampuri urusan satu sama lain, dan Persia mendorong pemberontakan yang dilakukan oleh Kurdi Irak. Ketegangan meningkat ketika Turki Ottoman menyerbu pelabuhan Muhammara (kemudian berganti nama menjadi Khorramshahr) dan kemudian menganiaya Syiah (Persia) di Irak. Inggris dan Rusia kemudian melakukan intervensi dan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan imbalan biaya. Tentara Persia menyerahkan Suleymanjah di Kurdistan dan merebut kembali Muhammara (Khorramshahr). Tentara Persia meninggalkan beberapa wilayah Zuhab Qashre Shirin dan menaklukkan Khizr (Abadan) dan wilayah antara sungai Bahmanshir (Hiro, 1991: 7-9). Perjanjian Aljazair ditandatangani ketika kendali Rusia dan Inggris atas Iran digantikan oleh Amerika Serikat pada era Shah Reza Pahlavi, namun dilanggar oleh Saddam Hussein setahun setelah revolusi Iran.

Saddam Hussein sendiri mengatakan revolusi Iran akan mengancam keseimbangan Sunni-Syiah di Timur Tengah. Faktanya, kelompok Syiah Irak (56%) tidak pernah mendukung pasukan Iran selama Perang Iran-Irak. Hal ini bukan karena Saddam Hussein adalah seorang Sunni dan mayoritas masyarakat Irak adalah Syiah, namun Saddam merasa posisinya terancam, dan hal itu dibenarkan. Saddam Hussein menderita semacam paranoia karena pemerintahan otoriternya hanya bisa bertahan berkat dukungan senjata. Saddam percaya bahwa jika setengah dari populasi Syiah Irak tertarik pada model pemerintahan Iran, hal ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kelanjutan pemerintahannya, terutama dengan tujuan menggantikan Iran sebagai penguasa negara-negara Teluk. Pada saat itu, Iran berada pada kondisi paling rentan dan situasi dalam negeri telah membaik sejak revolusi, sehingga menjadikan waktu yang tepat untuk melakukan serangan.

Pendapat Lenin mungkin bisa dibenarkan, karena perang ini berkepanjangan karena intervensi negara-negara besar Teluk seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia, serta perang Iran-Irak. Buku Vladimir Ilyich Lenin *Imperialisme: Tahap Tertinggi Kapitalisme*. Lenin berpendapat bahwa penyebab utama perang hanyalah kapitalisme. Buku tersebut berpendapat bahwa negara-negara kapitalis harus menjadi imperialis untuk mempertahankan akses pasar terhadap barang dan sumber daya alam mereka. Perang dimulai ketika negara kuat menguasai negara lemah. Selain itu, peperangan juga dapat disebabkan oleh persaingan antar negara kapitalis dalam perebutan wilayah jajahan (Lenin, 1970: 8).

Sebelum perang berakhir Pada awal perang, Khomeini menolak berdamai dengan Saddam. Saddam hanya menginginkan perdamaian ketika dia lemah. Oleh karena itu, Iran menetapkan beberapa syarat untuk menerima perdamaian. Pertama, pasukan Irak harus mundur dari wilayah Iran. Kedua, Saddam Hussein dicap sebagai agresor. Ketiga, Saddam Hussein akan diadili dan para pemimpinnya tidak lagi sewenang-wenang menggunakan kekuatan militer untuk menyerang negara lain. Irak dan negara-negara besar lainnya percaya bahwa Iran tidak punya hak untuk mengusulkan persyaratan perdamaian. Pada akhirnya, Iran dengan tegas menyetujui Resolusi Dewan Keamanan PBB 598 yang mengakhiri Perang Teluk pertama. Khomeini menganggap keputusan ini "pahit daripada racun". Pasalnya, negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris sudah berlokasi di Teluk Persia. Kehadiran puluhan kapal perang negara besar di perairan Teluk Persia dan jatuhnya pesawat sipil Iran oleh kapal perang AS menjadi alasan Iran mengadopsi Resolusi 598. Iran dan Irak menerima resolusi Juli 1988 pada bulan Agustus. Resolusi PBB 598, yang menyerukan gencatan senjata antara Iran dan Irak, mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 1988, mengakhiri Perang Teluk Pertama yang telah berlangsung lama. Baik Iran maupun Irak tidak bisa disebut sebagai pemenang perang. Iran menderita kerugian dalam negeri yang besar dalam perang tersebut, namun Irak masih memiliki hutang sebesar \$80 miliar, sebagian di antaranya berasal dari Arab Saudi dan Kuwait. Selain kerugian material akibat perang, kerugian militer dan sipil merupakan penyebab sebagian besar kerugian terkait perang.

c. ISIS

ISIS mengklaim gerakan dan perjuangannya mendirikan kekhalifahan Islam merupakan "perjuangan suci" sesuai dengan syarat hukum Islam. Oleh karena itu, siapa pun yang ikut serta dalam perang melawan ISIS dianggap sebagai "jihadis" dan dijanjikan berkah surgawi sebagai imbalannya (Ash-Syawi, 1997: -384). Perjuangan melawan ISIS seringkali dikaitkan dengan argumentasi sejarah Islam bahwa Khilafah Islam telah berdiri ratusan tahun pada masa kejayaan Islam, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Khilafah Islam kembali didirikan pada saat ini. Namun jika kita melakukan kajian normatif dan historis berdasarkan fakta sejarah yang ada, maka jelas apa yang sebenarnya diperjuangkan ISIS, dan tanpa kejelasan yang konkrit (semu), namun perjuangan Islam tidak bisa disebut sebagai tindakan perang suci. Kesalahan para pejuang ISIS yang bercita-cita ingin menegakkan *khilafah Islamiyyah* bagi seluruh dunia ialah menganggap bahwa agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis menyediakan mekanisme teknis secara konkret tentang sistem politik dan bentuk pemerintahan yang bisa diterapkan dalam sebuah negara. Islam dianggap telah menyediakan mekanisme yang konkret tentang bagaimana cara rakyat memilih seorang pemimpin (presiden) dalam sebuah negara, para wakil rakyat, para penegak hukum, atau pun bagaimana pengaturan mekanisme pemberian sanksi dalam setiap tindak kejahatan dan lain sebagainya.

Padahal, anggapan ISIS itu sungguh salah besar. Sebab, pada kenyataannya, Islam tidak Hal ini tidak hanya memberikan mekanisme konkrit untuk semua hal ini, namun juga memberikan kerangka moral-etika dan prinsip-prinsip dasar (yang tidak semuanya dijelaskan dengan jelas) bagi umat manusia secara keseluruhan untuk memandu lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Saya hanya melakukannya. Kerangka dasar dan prinsip etika moral terdapat dalam al-Quran dan Hadits Nabi. Contohnya seperti keadilan bagi semua pihak, penegakan manfaat sosial, pencegahan kerugian dan penyitaan mafsadat, dan kepastian hukum. Pasalnya, sebagaimana diungkapkan pemikir reformasi Islam Ali Abdul al-Rosik (1888-1966) dalam buku monumentalnya, cita-cita berdirinya kekhalifahan Islam yang disebarkan oleh kelompok ISIS sebenarnya merupakan konsep yang valid karena tidak terpikirkan. dalam Islam “Al-Islam wa Ushr al-Hukm” (1925) Ini mengikuti teori. Dalam bukunya, ia menyatakan bahwa tidak ada satu pun sistem politik atau bentuk pemerintahan yang dianggap sah menurut ajaran Islam. (Raziq, 1982: 122). Meskipun sistem politik berupa Kekhalifahan Islam yang diperjuangkan kelompok ISIS pada masa perang bersifat konstitusional, namun konsep Kekhalifahan Islam mempunyai banyak kelemahan dan bahkan bisa berarti kemunduran sistem politik tersebut. Ada kelemahan di yang belum bisa saya jelaskan.

Dibandingkan dengan sistem demokrasi yang kita jalani saat ini 4.444 tahun yang lalu, sistem ini adalah yang terburuk dari yang terburuk. Dengan kata lain, sistem demokrasi yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995 jauh lebih unggul dibandingkan kekhalifahan Islam pada tahun 1995. Misalnya, pada masa Kekhalifahan Islam, banyak undang-undang yang mengatur struktur pemerintahan yang cacat. Kesenjangan ini diungkap pada tahun 1936 oleh pemikir Islam kelahiran Maroko, Abed al-Jabiri. Menurutnya, ada tiga kesenjangan besar dalam kekhalifahan Islam. Pertama, belum ada metode konkrit dalam memilih khalifah (pemimpin) khilafah Islam Kedua, tidak ada batasan masa jabatan Khalifah. Ketiga, tahun ini tidak ada batasan kekuasaan khalifah.

Setelah ketiga kekosongan tersebut, terjadilah gejolak besar (al-Fitna al-Kubro) dalam sejarah masyarakat Islam, antara sekte 'Ali dan sekte Mu'aiya. Kekacauan akibat melemahnya bentuk pemerintahan khilafah berujung pada peralihan ke khilafah Islam. Lalu kita bandingkan dengan sistem demokrasi yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun . Indonesia memiliki sistem hukum dan peraturan demokratis yang jelas, komprehensif, adil dan selaras dengan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, masa jabatan maksimal presiden adalah dua periode, atau 10 tahun. Kepala negara (presiden) ditentukan dengan sistem pemilihan presiden langsung, dengan calon yang diusulkan oleh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presiden juga mempunyai batasan dan wewenang yang jelas. Semuanya diatur secara khusus dengan undang-undang. Tidak ada peraturan mengikat yang tidak dicantumkan dalam peraturan hukum. Oleh karena itu, pemulihan kekhalifahan Islam yang disebarkan kelompok ISIS sebenarnya merupakan kemunduran politik. Sistem tersebut saat ini diterapkan dalam sistem negara demokrasi Indonesia dan belum memiliki konsep yang jelas. Dalam konteks Indonesia, sistem demokrasi yang kita anut dengan hukumnya yang rumit, sempurna, adil dan modern merupakan pilihan yang tepat dan terbaik, jauh lebih unggul dibandingkan khilafah Islam semu yang masih dalam krisis. Oleh karena itu aneh jika masih banyak orang yang bergabung dengan ISIS untuk memperjuangkan Kekhalifahan Islam di muka bumi.

KESIMPULAN

Abad 20 dan 21 menjadi awal baru peradaban Islam setelah mengalami masa penjajahan oleh kolonialisme barat. Penjajahan barat atas dunia Islam menimbulkan sebuah sistem struktural baru dengan lahirnya negara-bangsa yang merdeka. Meskipun mengalami pengelompokan akibat adanya negara-bangsa umat Islam tetap berusaha kembali. Dinamika-dinamika yang dihadapi umat Islam pascapenjajahan pada abad ke-20-21 merupakan sebuah tantangan baru yang harus dihadapi umat Islam demi mengembalikan kejayaan Islam. Melihat perkembangan Islam mulai abad ke-20 hingga sekarang menimbulkan kesan optimistis bahwa kejayaan Islam jilid II akan segera terwujud.

Sebagai umat Islam di masa sekarang, tentunya perlu untuk menjaga pondasi dan bangunan yang sudah dibentuk oleh umat Islam sebelumnya. Umat Islam dewasa ini memiliki tanggungjawab besar untuk meneruskan perjuangan dalam membangun peradaban Islam yang lebih baik untuk mencapai kejayaan yang dicita-citakan. Karena sejarah bukan hanya sebuah cerita yang hanya untuk dikenang dan diingat, namun sejarah mengandung pelajaran yang harus diambil dan diamalkan oleh seseorang dan golongan untuk menjadikan mereka semangat dalam berubah, termotivasi dalam berbuat dan bergerak secara dinamis konstruktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel penelitian ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam artikel ini, untuk itu penulis menerima saran dan masukan guna untuk evaluasi dan perbaikan pada penulisan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Rabi, I. M., (2006). *Contemporary Islamic Intellectual History: A Theoretical Perspective*, Singapore: Majelis Agama Islam Singapura.
- Asari, Hasan. (2019). *Sejarah Islam Modern: Agama dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX*. Medan Perdana Publishing.
- Asari, Hasan., Tanjung M., & Dahlan, Z. (2020). *Tapak Tilas Peradaban Islam: Mengerti Masa Lalu Siap Untuk Masa Depan*. Medan: Perdana Publishing.
- Assagaf, Muhammad Hasyim. (2009). *Lintasan Sejarah Iran Dari Dinasti Achaemenia Ke Republik Revolusi Islam*. Jakarta: Kedubes Republik Islam Iran.
- Asy-Syawi, Taufiq. (1997). *Syura Bukan Demokrasi*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Boullata, I. J. (2001). *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, Yogyakarta: LKiS.
- Cattan, Henry. (1973). *Palestine and International Law*. London: Longman.
- Hiro, Dilip. (1991). *The Longest War: Iran-Iraq Military Conflict*. New York: Reutledge.
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam, terj. Ghufron, bag. I dan II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lenin, Vladimir Ilych. (1970). *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism*. New York: International Publisher.
- Momen, Mojan. (1985). *An Introduction to Shi'ism: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism*. New Haven and London: Yale University Press.
- Nor, Mohd. Roslan Mohd. (2010). Konflik Israel-Palestin dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis. *Journal Al-Tamaddun*, 5(1).
- Rais, M. Amin. (1999). *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Raziq, Ali Abd. (1982). *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah.
- Schulze, Reinhard. (2000). *Modern History of the Islamic World*. New York: University Press.
- Sharabi, H. B. (1992). *Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society*, New York: Oxford University Press.